

**OPTIMALISASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL
(Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**ADE EKO SETIAWAN
NPM : 1551020098**

Program Studi :Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Berdasarkan konstektual bank syariah, merupakan suatu wujud lembaga keuangan yang bersifat Islami, yaitu menjalankan segala aktivitasnya baik menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki produk dan jasa yang tidak ditemukan dalam operasi bank Konvensional. Prinsip-prinsip seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah dan sebagainya yang dimana Perbankan Syariah tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh Perbankan Konvensional. Keberadaan, produk serta jasa Bank Syariah, tentu akan menjadi suatu yang mungkin diminati dan mungkin pula juga tidak. Hal yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah adalah menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang stabil dan berkelanjutan. Salah satunya adalah menggarap pasar lainnya di luar keuangan, seperti gaya hidup halal (*halal life style*). Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana optimalisasi peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal. Adapun penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui, menganalisis serta memahami sejauh mana peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal khususnya dibidang halal fashion. Berikut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dan informasi dari lapangan, yaitu dari pelaku industri halal fashion busana muslim di provinsi Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha industri halal fashion busana muslim di 3 Kabupaten/Kota di provinsi Lampung yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu. Yang terdiri dari 17 responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi melalui event-event yang kepada para pelaku industri halal fashion di Provinsi Lampung.

Kata kunci: **Bank Syariah, Industri Halal Fashion.**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PERAN PERBANKAN SYARIAH**
DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL
(Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung)

Nama : **Ade Eko Setiawan**

NPM : **1551020098**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

NIP. 197605292008012010

M. Kurniawan, S.E., M.E.Sy

NIP. 198605172015031005

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erika Anggraini, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **OPTIMALISASI PERAN PERBANKAN SYARIAH**
DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL (Studi Pada Industri
Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung) disusun oleh **Ade Eko Setiawan**,
NPM: **1551020098** Jurusan Perbankan Syariah, diujikan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: **Kamis, 19**
Desember 2019

TIM MUNAQASH

Ketua Sidang : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

Sekretaris : **M. Filki Nugraha Kholid, M.Pd**

Penguji I : **Deki Fermansyah, M.S.I**

Penguji II : **Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa:9)¹



^{1 1} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h. 78.

PERSEMBAHAN

Hidup merupakan perjuangan dan cita-cita, kerja keras dan doa disetiap prosesnya, tak terlepas akan rasa lelah, kecewa, dan kebahagiaan. namun terasa begitu indah pada saat titik akan mencapai hasil. Selayaknya dedaunan yang jatuh merupakan atas izin Allah, untuk pengorbanan akan terciptanya gizi bagi tanaman baru yang ingin mencapai puncak. Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas setiap keberkahan, keridhoan dan keindahan dalam menjalani tiap makna kehidupan. Hingga salawat atas Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan banyak sekali pedoman dalam menjalani dan memaknai arti kehidupan. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibu dan Ayahku tercinta, Hayani dan Syaiful Ahmadi, Ama.Pd. yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, motivasi, pengorbanan dan tak henti-hentinya memberikan semangat luar biasa yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu memberikan keridhoan dan keberkahan: usia, kesehatan, kemurahan rezeki dan disetiap langkahmu selalu dalam lindungan-Nya, Aamiin.
2. Adik-adikku tercinta, Diah Alawiyah dan Syahrin Yusuf yang senantiasa mendukung dengan doa, motivasi maupun dalam bentuk materi yang diberikan untukku.
3. Almamaterku tercinta, UIN Raden Intan Lampung, terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT HIDUP

Ade Eko Setiawan dilahirkan di Tangerang pada tanggal 24 Januari 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Syaiful Ahmadi dan Ibu Hayani. Pendidikan dimulai dari SDN Gedung Batin Blambangan Umpu Way Kanan dan selesai pada tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Way Kanan selesai tahun 2012, Madrasah Aliyah Ponpes Raudhatul Muta'allimin Kasui Way Kanan selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 22 Oktober 2019

Yang Membuat,

Ade Eko Setiawan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal (Studi pada Industri Halal Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung”, dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas terselesaikannya skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S. Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah, terimakasih atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.Si. dan Bapak Muhammad Kurniawan M.E.Sy. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Daerah Bandar Lampung yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.
6. Teman-teman Alumni Ponpes Raudhatul Muta'allimin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, semangat dan canda tawa yang kalian berikan, tetap semangat menjalani kehidupan.
8. Teman-teman ku Mukhlis, Reni Setiawati, Ahmad Zulfiqar, Adiba Kanza, Azizah Munawwarah, Selma Ilmalana, Mizwar, Hasan yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat selalu bersemangat dalam kuliah khususnya dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman squad Kkn Kebangsaan 2018 Pekon Penyandingan, Mhd. Muslim, Prof. Randi, Deasy Rike Rahmawati, Fathimatul Izzah Aritonang, Nur Afiqah Batrisya, Putri Pertama Sari, yang telah mengajarkanku hakikat dari pertemanan selama Kkn serta banyak memberikan dorongan motivasi kepadaku. Tetap kompak kawan mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita kembali dalam nauansa kesuksesan aamiin.

8. Keluarga besar Perbankan Syariah 2015, kelas G, (Kuning Hijau), Terimakasih kalian selalu menemani, berbagi canda tawa, dari awal perkuliahan hingga akhir.

9. Keluarga besarku Piut Abdul Ghani. Terimakasih tak terhingga kalian selalu memberi motivasi serta bantuan baik fisik maupun materil kepadaku, semoga Allah SWT selalu melindungi serta mencurahkan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada keluarga besar kita sehingga menjadi keluarga yang qurrata a'yun menyejukkan dan menentramkan sakinah mawaddah dan warahmah aamiin.

9. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu terjalin dalam ukhuwah islamiyah kita bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam bidang khazanah Perbankan Syariah.

Bandar Lampung 22 Oktober 2019

Yang Membuat,

Ade Eko Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..	i
ABSTRAK....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Batasan Masalah	16
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian.....	16
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Populasi dan Sampel.....	22
5. Pengolahan Data	23
6. Teknik Analisis Data.....	24
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Teori Optimalisasi Peran.....	25
1. Pengertian Optimalisasi Peran	25
2. Konsep Optimalisasi	27
B. Bank Syariah.....	29
1. Pengertian Bank	29
2. Prinsip-prinsip Bank Syariah	30
3. Dasar Hukum Bank Syariah	31
4. Tujuan Bank Syariah	32
5. Produk Umum Perbankan Syariah.....	34
C. Konsep Industri halal Fashion Menurut Islam dan Ulama.....	37
1. Definisi Halal	37
2. Kriteria Industri Halal	40
3. Indikator Produk Halal.....	48

D. Teori Konsumsi.....	50
1. Pengertian Konsumsi.....	50
2. Konsumsi Dalam Islam	53
3. Batasan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.....	59
E. Teori Perilaku Konsumen	60
1. Pengertian Perilaku Konsumsi	60
2. Fator-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi.....	63
F. Tinjauan Pustaka	68

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Provinsi Lampung	73
B. Kondisi Geografis	74
C. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	76
D. Perkembangan Industri Halal fashion di Provinsi Lampung	81
E. Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal Fashion di Provinsi Lampung	86

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal	93
1. Event yang diadakan Bank Syariah.....	93
2. Kekhususan Produk Pembiayaan Bagi Pelaku Industri Fashion Busana Muslim.....	93
3. Industri Halal Fashion Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	94

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Jumlah Kantor Cabang BUS di Indonesia	4
1.2 Data Total Pendapatan dan Estimasi Pendapatan Industri Halal.....	11
1.3 Jumlah Pelaku Usaha Industri Halal Fashion Busana Muslim di Bandar Lampung, Metro dan Pringsewu	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Wawancara Pelaku Usaha
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 4 : Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Berita Acara Munaqasah
- Lampiran 6 : Pernyataan Tidak Plagiarisme



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karena itu sebelum penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul mengenai *“Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal (Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung)”*.

Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Optimalisasi** adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹
2. **Peran** adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.²
3. **Perbankan Syariah** adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

¹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4.

² Soejono Soekanto, *Sosiologi Pengantar* (Jakarta, 2012), h. 212.

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

4. **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.⁴
5. **Halal** adalah sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.⁵

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini “ Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal di Provinsi Lampung”. Penelitian ini bermaksud untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal di provinsi lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah:

1. Alasan objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui optimalisasi peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal fashion busana muslim di provinsi lampung. Dimana Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram.

³ Andri Soemitro, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009), h. 58.

⁴ Raden Roro Azka Nadhira, *Potensi Industri Halal Di Indonesia*, www.ibec-febui.com

⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Ensikopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 199.

Kemudian dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang diperlukan sangat menunjang, banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini ke depannya. Selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung.

2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian memiliki akses serta letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi di Indonesia kini sudah memasuki babak baru. Semakin menjamurnya industri perbankan syariah di Indonesia menandakan bahwa sistem ekonomi syariah tersebut mengalami kemajuan. Terbukti sejauh ini pertumbuhan industri perbankan syariah sangat signifikan. Data statistik yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulan Januari tahun 2019 yang lalu, menyebutkan jumlah perbankan syariah di Indonesia kini mencapai

14 Bank Umum Syariah (BUS), dengan total 477 Kantor Pusat Operasi (KPO), 1207 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 201 Kantor Kas (KK).⁶

Tabel 1.1

Jumlah Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	KC	KCP	KK
Bank Umum Syariah (BUS)	477	1.207	201
1. PT. Bank Aceh Syari'ah	26	89	28
2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat	13	22	4
3. PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4. PT. Bank Victoria Syari'ah	9	5	-
5. PT. Bank BRI Syari'ah	50	206	12
6. PT. Jabar Banten Syari'ah	9	55	1
7. PT. BNI Syari'ah	68	191	17
8. PT. Bank Syari'ah Mandiri	129	429	55
9. PT. Bank Mega Syari'ah	27	34	7
10. PT. Bank Panin Dubai Syariah	15	3	-
11. PT. Bank Syari'ah Bukopin	12	7	4
12. PT. BCA Syari'ah	12	12	16
13. PT. BTPN Syari'ah	24	2	-
14. PT. Maybank Syari'ah Indonesia	1	-	-

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah Januari 2019⁷

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah sampai dengan bulan Januari 2019 adalah sebanyak 477 Kantor Cabang, 1.207 Kantor Cabang Pembantu dan 201 Kantor Kas bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menandakan perkembangan Bank Umum Syariah diseluruh Indonesia sangat cukup luas.

Bank syariah memiliki produk dan jasa yang tidak ditemukan dalam operasi bank Konvensional. Prinsip-prinsip seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah dan sebagainya yang dimana Perbankan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Januari 2019", Dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019.aspx> 5 (Diakses Pada 28 Maret 2019)

⁷ *Ojk.go.id* (diakses pada tanggal 03 april 2019, pkl. 16.00)

Syariah tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh Perbankan Konvensional. Keberadaan, produk serta jasa Bank Syariah, tentu akan menjadi suatu yang mungkin diminati dan mungkin pula juga tidak. Masalah utama yang dihadapi Perbankan Syariah yaitu bagaimana bank menarik pelanggan dan mempertahankannya agar bank tersebut dapat bertahan dan terus berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Raden Bagus Faizal Irany Sidharta,⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran bank syariah dalam mendukung wisata halal dan untuk menganalisa potensi bank syariah dalam mendukung wisata halal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bank syariah dalam mendukung wisata halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pelaku industri wisata, akses kantor dan jaringan atm yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan *even* yang menarik agar dapat merubah *mindset* masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif.

⁸ Raden Bagus Faizal Irany Sidharta, *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*, dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 5. No. 2 (September 2017), h. 1.

Faqiatul Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini,⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia” dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan telaah literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (*halal value chain management*). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses *halal integrity*. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terakhir tahap *halal verification*.

Dilihat dari review penelitian terdahulu, telah ada penelitian tentang Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal, tapi fokus penelitian terdahulu hanya pada industri wisata halal. Mengingat belum adanya penelitian yang membahas dibidang halal fashion. Karena halal fashion juga berpotensi untuk dijadikan pangsa pasar Perbankan Syariah.

⁹ Faqiatul Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini, *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*, dalam Jurnal Muqtasid, Vol. 9. No. 1 (Juni 2018), h. 1.

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah elemen dari di Indonesia. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu Undang-undang yang melandasi awal perkembangan perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.¹⁰

Peran aktif dari pemerintah serta respon positif dari masyarakat pada umumnya, menjadikan industri keuangan nasional tumbuh dan berkembang secara signifikan, meski belum menyamai negara-negara yang sudah lebih dulu mengembangkan industri keuangan syariah. Pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang semakin mendalam, memunculkan diskursus tentang aplikasi sistem keuangan syariah, baik jenis lembaga yang

¹⁰ Hani Werdi Apriyanti, *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis peluang dan Tantangan*, dalam Jurnal Maksimum, Vol. 1, No. 1 (September 2017), h. 17-18.

tersedia, produk dan akad maupun penggunaannya.¹¹ Secara umum, data kuantitatif menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset keuangan syariah meningkat, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya, namun meningkat pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2015 dan 2016 masing-masing 19,94% dan 29,65%.¹²

Peran strategis perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi rakyat harus terus ditingkatkan dengan menangkap berbagai peluang yang ada di era *financial digital* yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam produk perbankan. Persaingan ini semakin diperkuat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 untuk industri perbankan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, industri perbankan syariah harus terus memperkuat diri agar dapat meningkatkan peran dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Industri perbankan syariah harus menjadi industri yang kuat, memiliki *market share* yang tinggi, dan menjadi pilihan masyarakat. Industri perbankan syariah yang merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat muslim akan penerapan konsep syariah dalam bidang ekonomi seharusnya mampu menjadi utama dalam industri perbankan, mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia adalah mayoritas muslim.¹³

¹¹ Aan Nasrullah, *Analisis Potensi Industri Halal bagi Pelaku Usaha di Indonesia*, Ejournal Kopertais4.or.id, h. 51

¹² *Ojk.go.id* (diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pk1. 10.20)

¹³ *Ibid.*, h. 17.

Perkembangan keuangan syariah tidak begitu saja terjadi, namun memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang keras berbagai pihak, perkembangan industri keuangan syariah dimulai dari hasil lokakarya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1990 yang merekomendasikan berdirinya perbankan syariah. Dan pada tahun 1992 berdirilah bank Muamalat, bank dengan sistem syariah, dari industri perbankan merembet ke sektor keuangan lainnya, yakni Pasar Modal Syariah dengan yang mengembangkan Saham Syariah, Reksa Dana syariah, Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara. Kemudian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang mengembangkan Perusahaan Perasuransian Syariah Lembaga Pembiayaan Syariah, lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus LKM Syariah. Terhitung Indonesia sudah dua dekade mengembangkan industri keuangan syariah.¹⁴

Perkembangan keuangan syariah global serta dorongan dari kesadaran masyarakat Indonesia akan penerapan prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah secara umum, menjadikan pasar keuangan syariah domestik turut mengalami perkembangan. Dan kedepan pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga pemangku tanggung jawab industri keuangan, telah berkomitmen untuk menjadikan keuangan syariah Indonesia tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.¹⁵

Namun yang perlu dipahami adalah bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya cukup pengembangan sektor industri keuangan syariah

¹⁴ Aan Nasrullah, *Analisis Potensi Industri Halal*, h. 52

¹⁵ *Ibid.*,

semata, seperti perbankan, pasar modal atau industri keuangan non-bank syariah, tetapi juga diperlukan pengembangan di sektor riil dalam hal ini adalah produksi barang dan jasa halal. Hal ini mengingat bahwa keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter harus selalu terjaga karena keterkaitan dari kedua sektor utama inilah sudah seharusnya keduanya dikembangkan secara berkesinambungan, apabila hanya sektor moneter yang dikembangkan, maka jumlah uang beredar (JUB) akan melebihi dari jumlah produksi barang dan jasa, dan dampak selanjutnya adalah inflasi, tentu ini akan mengganggu perekonomian nasional secara umum.¹⁶

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Adiwarman Karim, bahwa hal yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah adalah menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang stabil dan berkelanjutan. Salah satunya adalah menggarap pasar lainnya di luar keuangan, seperti gaya hidup halal (*halal life style*) masyarakat.¹⁷

Menurutnya, “selama ini terlalu berfokus pada sektor keuangan syariah. Sekarang, telah disadari bahwa tidak cukup sisi keuangan, tetapi juga harus diperkuat orang yang membutuhkan keuangannya (industri halal) sehingga *halal life style* bisa dikembangkan”.¹⁸

Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri,

¹⁶ *Ibid.*, h. 53

¹⁷ Sayr Primadhyta, “Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah”, CNN Indonesia, dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah> (Diakses pada 28 Maret 2019)

¹⁸ *Ibid*

salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesional. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, jaminan produk halal (JPH) juga meningkatkan daya saing produk di global market.¹⁹

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain: makanan halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016-2017* oleh Thomson Reuters, pada tabel 1.1, menunjukkan total pendapatan pada tahun 2021.²⁰

Tabel 1.2
Total Pendapatan dan Estimasi Pendapatan Industri Halal

<i>Sektor</i>	Total Pendapatan (2015)	Estimasi Pendapatan (2021)
Makanan halal	\$ 1,17 Triliun	\$ 1,9 Triliun
Keuangan	\$ 2 Triliun	\$ 3,5 Triliun
Travel	\$ 151 Miliar	\$ 243 Miliar
Fashion	\$ 243 Miliar	\$ 368 Miliar
Obat dan kosmetik	\$ 78 Miliar	\$ 132 Miliar
Media dan hiburan	\$ 189 Miliar	\$ 262 Miliar
Healthcare	\$ 436 Miliar	-
Pendidikan	\$ 402 Miliar	-

Sumber: State of The Global Islamic Economy 2016/2017

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Faqiatul Mariya Waharini, Anissa hakim Purwantini, *Model Pengembangan Halal Food*, h. 2

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, total pendapatan serta estimasi pendapatan industri halal 2016-2017 menunjukkan pertumbuhan yang positif mulai dari: makanan halal, keuangan, travel, fashion, obat dan kosmetik, media dan hiburan, healthcare serta pendidikan.

Dunia fashion berubah sangat cepat. Tak terkecuali busana muslim, khususnya muslimah. Dulu tak banyak pilihan model busana muslimah. Sekarang, busana muslimah malah menjadi tren. Belakangan ini, telah banyak sekali media menyajikan beragam informasi menarik seputar dunia fashion di negara kita. Perkembangan dunia fashion mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa dekade terakhir. Bahkan Indonesia dicanangkan menjadi kiblat fashion muslim dunia di tahun 2020. Hal ini diwacanakan oleh *Indonesia Islamic Fashion Consortium* (IIFC). Ini sangat dimungkinkan mengingat industri busana muslim di Indonesia telah mengalami pertumbuhan sejak tahun 1990-an.²¹

Tren fashion muslim di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Baik di jalan maupun di mall, banyak wanita berhijab yang tampil modis dengan gayanya masing-masing. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan sekitar 80 persen produk pakaian muslim dijual untuk pasar domestik, sementara 20 persen sisanya diekspor.²² Bahkan sampai Juli 2018, ekspor pakaian muslim mencapai angka Rp 8,2 miliar dollar AS (Rp 122 triliun). Ini berarti nilai pertumbuhan ekspornya 8,7 persen. Belum lagi catatan dari *Global Islamic Economy* yang memprediksi pertumbuhan pasar

²¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *fesyen Muslim Indonesia*, dalam Ditjen PEN/WRT/31/IV/2015 edisi April, hal. 2.

²² Kumparan.com, diakses pada 24 April 2019

fashion muslim dunia pada 2029 mencapai Rp 327 miliar dollar AS. Tentu Indonesia punya peluang untuk menjadi kiblat fashion muslim dunia²³ Sementara itu sepanjang 2013, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perusahaan yang bergerak di bidang fashion mencapai 1.107.955 unit dengan rincian 10 persen perusahaan besar, 20 persen perusahaan menengah, dan 70 persen adalah pengusaha kecil²⁴

Dari penjelasan di atas tersebut dapatlah diambil suatu analisa bahwa, industri halal menunjukkan perkembangan yang signifikan, begitupun dengan industri halal fashion juga mengalami perkembangan. Namun hingga saat ini industri halal fashion belum memiliki konstruksi indikator dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Maka dari itu perlu adanya peraturan atau indikator agar industri halal fashion tetap pada jalur kehalalannya. Indikator tentang industri halal fashion belum diatur secara spesifik oleh fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Di dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 168 Allah Berfirman:²⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
١٦٨

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Setelah Allah Swt menjelaskan bahwasannya tiada sembahyan yang hak kecuali Dia dan bahwasannya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun

²³ <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 24 April 2019

²⁴ Kumparan.com, diakses pada 24 April 2019

²⁵ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan....*, h. 25.

menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rizki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya , seperti mengharamkan *bahirah, saibah, washilah*, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyyah.²⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu analisa bahwa, Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik yang tidak membahayakan dan merusak bagi tubuh dan akal pikiran serta kesehatannya. Dan juga Allah Swt melarang kepada hamba-hamba-Nya untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kesesatan.

Ayat di atas hanya mengatur secara global tentang aturan dalam mengkonsumsi suatu barang. Namun, perlu adanya aturan yang lebih spesifik lagi, dikarenakan perkembangan industri halal semakin pesat.²⁷

Adapun pra penelitian berdasarkan pengamatan peneliti selama survey ke para pelaku industri busana muslim di provinsi lampung bahwa tidak dapat dipungkiri, perkembangan industri busana muslim dari waktu ke waktu di

²⁶ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Bogor: Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 320.

²⁷ M. Dliyaul Muflihini, *Konstruktor Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*, dalam Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, h. 7.

Provinsi Lampung mengalami kemajuan yang pesat dengan banyaknya pelaku usaha yang membuka toko-toko yang menjual rangkaian busana-busana muslim seperti zoya, rabbani, nibras'house, elzatta, mumtaz dan lain sebagainya, inilah beberapa toko busana muslim yang mencoba mengenalkan aneka kebutuhan busana muslim kepada masyarakat seperti hijab, kerudung, gamis, hingga set hijab syar'i dengan harga yang kompetitif.²⁸

Kementerian Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri halal yang ditargetkan selesai sebelum tahun 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya respon atas peningkatan permintaan produk halal di dunia. Kawasan industri halal adalah kawasan industri yang di dalamnya semua industri menerapkan atau sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir. Kawasan industri halal ini akan dipilih di wilayah Jawa karena sudah tersedia kawasan industri sektor *consumer goods*. sedangkan pengolahannya, pemerintah akan menyerahkan kepada salah satu pelaku usaha yang telah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik.²⁹

Semakin berkembangnya tren fashion halal di Indonesia tentunya diharapkan akan menarik perhatian minat masyarakat Indonesia untuk mengenakan tren fashion halal kedepannya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan**

²⁸ Pra Penelitian, pada tanggal 2 Agustus 2019.

²⁹ *Ibid*

Industri Halal (Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumusan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

Bagaimana peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal fashion?

E. Batasan Masalah

Penulis menyadari akan luasnya bahasan yang terdapat dalam judul tersebut. Oleh karena itu, penulis hanya akan mengambil sampel industri halal fashion busana muslim yang terdapat di tiga (3) Kabupaten atau Kota, yang masuk kategori tiga besar dengan *market share* tertinggi di Provinsi Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal fashion.

G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal fashion.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: memberikan pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal.
- b. Bagi Perbankan: Sebagai bahan evaluasi perbankan syariah agar lebih mengoptimalkan perannya dalam mengembangkan industri halal agar terciptanya pertumbuhan industri perbankan syariah yang lebih baik lagi kedepannya.
- c. Bagi peneliti: Dapat menambah pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan industri halal fashion sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi peneliti selaku kalangan akademisi untuk ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan serta mengedukasikan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah kepada masyarakat umum.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini jika dilihat dari pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, *postpositivistik*; *artistik*; dan *interpretive*.³¹ Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Dengan demikian, juga menurut Melong, sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.³²

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 7

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 21-22

menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan.³³ Dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah industri busana muslim di provinsi lampung.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.³⁴

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti dan lokasi penelitian adalah industri halal fashion busana muslim di Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data, atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan 2 jenis data, yaitu data sekunder dan data primer.

a) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Sesuai dengan asalnya darimana data tersebut

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Semarang: PT Bumi Aksara, 2013), h. 44

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 43

diperoleh, maka jenis data ini sering disebut dengan istilah data mentah (raw data).³⁵

Sumber data primer dari penelitian ini adalah data pelaku industri halal fashion busana muslim di Provinsi Lampung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian. Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, internet, dan kepustakaan lain yang mendukung atau berkaitan



dengan pembahasan dalam skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kualitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini teknik penelitian data yang digunakan adalah :

a. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*), cara ini dilakukan untuk memperoleh dan menggali data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan, informan yang dijadikan obyek dalam wawancara dimaksud,

³⁵ Muhammad, Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 122

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225

antara lain dilakukan kepada informan kunci, seperti kepada para pelaku industri busana muslim.

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam pengertian lain, metode kepustakaan juga memiliki makna yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.³⁷

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan pertumbuhan industri halal di Indonesia. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah penelusuran *online*, yaitu dengan cara melakukan penelusuran melalui media internet. Data laporan pertumbuhan industri halal fashion didapat dari website Kementerian

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* ,..., h. 291

Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) dan website Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi bukan berarti penduduk seperti yang dimaksud di dalam studi tentang kependudukan. Di dalam metodologi Penelitian populasi adalah merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.³⁸

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.³⁹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jenis industri fashion busana muslim di Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁸ Jusuf Soewadji, h. 129

³⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116

⁴⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, 2013, h. 80

purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri spesifik.⁴¹ Proses seleksi sampel didasarkan oleh kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu busana muslim.

Data yang disajikan adalah data pelaku industri fashion busana muslim di Provinsi Lampung. Maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku industri halal fashion busana muslim di Bandar Lampung, Metro dan Pringsewu yang berjumlah sebanyak 17 para pelaku usaha industri halal fashion busana muslim .

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:⁴²

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran

⁴¹ Moh. Pabundi Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Cet. Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 46

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, 2016, h. 152

fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

⁴³ *Ibid.*, h. 335

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Optimalisasi Peran

1. Pengertian Optimalisasi Peran

Optimalisasi peran terdiri dari dua kata yaitu optimalisasi dan peran. Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal atau efektif. Optimalisasi berarti pengoptimalan.⁴⁴ Pengertian optimalisasi menurut ahli adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya, atau dapat didefinisikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁴⁵

Adapun maksud optimalisasi menurut bahasa (lughawiyah) berasal dari kata “optimal” yang artinya “terbaik, tertinggi”,⁴⁶ dalam analisis penelitian tersebut, merupakan “tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan”. Khususnya dalam bidang desain, konstruksi, dan pemeliharaan dari sistem teknik, kemudian harus diambil beberapa teknologi dan keputusan managerial dalam beberapa tahap.

⁴⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gita Media Press, 2015), h. 562.

⁴⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear*,..., h. 4.

⁴⁶ Agus Sulistyono dan Adhi Mulyono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surakarta: ITA, 2011), h. 317.

Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan.⁴⁷

Dari penjelasan mengenai teori optimalisasi tersebut dapat diambil suatu analisis bahwa, suatu titik optimal dapat diperoleh apabila telah diketahui titik lemah (*weak spot*) yang mengganggu dengan cara meminimalkannya, sehingga titik optimal akan perlahan naik seiring dengan diminimalkannya titik lemah tersebut.

Sedangkan pengertian peran menurut beberapa ahli diantaranya menurut Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁴⁸ Selanjutnya Maurice Duverger berpendapat bahwa peran adalah atribut sebagai akibat status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan merupakan sebuah aspek dari status.⁴⁹

Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil suatu analisa bahwa, peran adalah seperangkat tingkah laku seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar lingkup sekitarnya.

⁴⁷ Singiresu, S. Rao, *Engineering Optimization: Theory and Practice* (New Jersey: Jhon Wileyand Sons, 2009), h. 5.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Pers, 2012), h. 212.

⁴⁹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 102.

2. Konsep Optimalisasi

Seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi merupakan upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu secara efektif dan efisien. Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya setiap kegiatan usaha selalu memiliki upaya atau strategi tersendiri dalam optimalisasi tujuannya tersebut. Seperti, misalnya yaitu melakukan strategi pemasaran yang mencakup *price*, *palce*, *product*, dan *promotion*. Sedangkan dalam organisasi atau kelembagaan, untuk mencapai optimalisasi dari tujuan organisasi atau kelembagaan yaitu dengan meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.

Di dalam suatu organisasi maupun lembaga tentunya memiliki asas atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara maksimal. Berikut ini asas-asas organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan optimalisasi organisasi sehingga mampu menjadi organisasi yang unggul, efektif, dan berdaya guna sesuai kebutuhan.⁵⁰

- a) Asas tujuan organisasi, harus jelas dan rasional;

⁵⁰ Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 8-9.

- b) Asas kesatuan tujuan, harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai;
- c) Asas kesatuan perintah, bawahan menerima perintah dan mempertanggungjawabkannya hanya kepad seorang atasan;
- d) Asas rentang kendali, manajer hanya bisa memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 orang atau 9 orang;
- e) Asas pendelegasian wewenang, pembagian wewenang harus jelas dan efektif;
- f) Asas keseimbangan wewenang dan tanggungjawab, wewenang yang diberikan dengan tanggungjawab yang timbul karenanya harus sama besarnya;
- g) Asas tanggungjawab, harus sesuai dengan garis wewenang;
- h) Asas pembagian kerja;
- i) Asas penempatan personalia;
- j) Asas jenjang berangkai, prosedur wewenang harus bersifat vertikal yang jelas, tidak terputus-putus dengan jarak pendek;
- k) Asas efisiensi;
- l) Asas kesinambungan;
- m) Asas koordinasi.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mencapai optimalisasi dalam suatu lembaga atau organisasi maka diperlukan pengembangan kapasitas atau *capacity building*, yang mana pengembangan kapasitas ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan lembaga atau

organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁵¹ Kapasitas adalah kemampuan organisasi atau *system* untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus sehingga organisasi atau *system* tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal.⁵²

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank

Bank Syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan sistem riba. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah yang disebut tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵³

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan

⁵¹ Yermias T. Keban, *Good Governance dan capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah* (Yogyakarta: Gava Media, 2000), h. 7.

⁵² Bambang Santoso, dkk, *Capacity Building* (Malang: UB Press, 2012), h. 2.

⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), h. 12.

pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.⁵⁴

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu analisa bahwa, bank syariah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*).

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁵⁵

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

⁵⁵ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia Cet I, 2005), h. 33.

sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.⁵⁶

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁵⁷

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁸

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1998, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁵⁹

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah)

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, Cet ke-4, 2006), h. 6.

yang dapat melayani transaksi kegiatan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada waktu Tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, Tahun 1992 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁶⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan deregulasi. Pengaturan (deregulasi) perbankan syariah tersebut bertujuan untuk menajmin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan

⁶⁰ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah (Jakarta: 2011), h. 5.

meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:⁶¹

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha membawa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

⁶¹ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank ...*, h. 47.

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisa bahwa, pada dasarnya tujuan bank syariah dan bank konvensional adalah sama-sama mencari keuntungan, tapi lebih penting dari itu bank syariah bukan hanya sekedar bertujuan mencari keuntungan belaka. Namun, hadirnya bank syariah memberikan arah baru kepada masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat yang ekonomis dan juga meningkatkan partisipasi dan antusias masyarakat agar supaya yang tadinya enggan bertransaksi dengan bank dengan alasan sistem bunga sehingga dengan kehadiran bank syariah ini masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan transaksi dengan bank syariah.

5. Produk Umum Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan dengan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk yang dimaksud, secara teknis telah mendapat persetujuan dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai ketinggian operasionalnya. Adapun produk-produk umum perbankan syariah sebagai berikut:⁶²

⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan...*, h. 40.

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antar pihak diaman pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat si pengelola. Namun seandainya kerugian tersebut disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kehiatan usaha bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambaha keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

c. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini juga sering disebut juga dengan *profit & loss sharing*.⁶³

d. Wadi'ah

Wadiah dalam tradisi fiqih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah juga dapat dartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi'ah, menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad damanah*). Dimana, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank.

Di samping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola tersebut (bank) memperoleh keuntungan, maka laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian *understanding* di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.

e. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan permintaan

⁶³*Ibid*, h. 42.

kepemilikan (*ownership milkyyah*) atas barang itu sendiri. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu hire contract.

Dari penjelasan di atas dapatlah dianalisa bahwa, produk umum perbankan syariah terdiri atas, produk mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), musyarakah, wadi'ah (titipan) dan ijarah (sewa).

C. Konsep Industri Halal Fashion Menurut Islam dan Ulama'

1. Definisi Halal

Masalah halal dan haram telah ada semenjak manusia diturunkan ke bumi yang berlaku untuk semua ciptaan Allah dan menjadi pondasi neraca kehidupan.⁶⁴ Allah SWT menentukan halal dan haram dengan alasan yang rasional demi kemsalahatan manusia itu sendiri. Namun kehalalan dan keharaman itu bisa dilihat secara nyata seperti daging babi yang sudah jelas keharamannya, tetapi juga ada yang tidak dapat dilihat secara langsung seperti produk makanan yang di dalamnya memiliki kandungan seperti *emulsifier* E471, *Lestisin*, *Rhum* atau *Lard* (minyak babi). Salah satu prinsip yang diakui oleh Islam adalah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram.⁶⁵

⁶⁴ Mutawalli Sya'rawi, *Halal dan Haram* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), h. 12.

⁶⁵ Renny Supriyatni, *Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 2, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Juli 2011), h. 340.

Halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla* yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh *syara'* (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum khamr, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri. Menurut Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'kub, MA suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu:

- a. Makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan.
- b. Tidak mengandung dharar (bahaya) yaitu sesuatu yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi tubuh.
- c. Tidak mengandung najis
- d. Tidak memabukkan
- e. Tidak mengandung organ tubuh manusia.⁶⁶

Ajaran Islam berkaitan dengan halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Selain itu, halal

⁶⁶ Muchith A. Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan: Jakarta, 2013), h. 11.

dan haram juga berkaitan dengan perilaku dan aktifitas ekonomi atau muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, praktik riba dan yang lain. Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap dan spekulasi.⁶⁷

Sedangkan dalam bidang konsumsi, halal merupakan prinsip penting yang harus ditaati oleh konsumen selain prinsip yang lain. Islam telah menentukan tiga prinsip dasar dalam konsumsi, yaitu: prinsip konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih serta prinsip tidak berlebihan. Konsep halal dan *thayyib* (baik) telah menggariskan panduan bagi hal-hal yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Dalam memilih makanan dan minuman, kehalalan adalah hal yang mesti diutamakan. Manakala konsep halal dalam aktifitas ekonomi tercermin pada praktik pertukaran. Praktik pertukaran meliputi jual beli, sewa, partnership (musyarakah), ju'alah dan jenis pertukaran yang lain. Pertukaran sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena setiap orang tidak dapat menghasilkan semua keperluan hidupnya. Setiap orang hanya dapat menghasilkan semua keperluan hidup yang lain dipenuhi dari orang lain dengan cara pertukaran.⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu analisa bahwa, halal merupakan suatu kegiatan yang dibenarkan atau diizinkan dan

⁶⁷Murtadho Ridwan, *Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, Vol. 2, No 1 2018, h. 22.

⁶⁸*Ibid.*, h. 24-26.

diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk dikonsumsi baik itu dari segi makanan, minuman atau lain sebagainya.

2. Kriteria Industri Halal

Sebagai negara yang besar dengan penduduk yang mayoritas adalah beragama Islam, tentu merupakan hal yang ironi jika kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terjamin kehalalannya, serta tidak ada pihak yang dapat benar-benar memastikan bahwa bahan baku atau produk jadi yang beredar dan diperdagangkan di pasaran terjamin kehalalannya. Sedangkan di sisi umat muslim dituntut untuk mengonsumsi produk yang halal secara kaffah, mulai dari bahan baku, proses sampai produk siap konsumsi.⁶⁹ Adapun kriteria industri halal sebagai berikut:

a. Proses produksi yang sesuai syariat Islam

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan masih sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasannya sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Aan Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal", h. 60.

⁷⁰ M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 148.

Menurut Khaf yang dikutip oleh Al-Arif mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama yaitu kebahagiaan dunia akhirat.⁷¹

Menurut Nasution definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat dimasa kini dan mendatang. Disamping itu, pengertian produksi juga merujuk pada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala jenis input yang masuk pada proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi.⁷²

Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya adalah tanah, gedung, mesin-mesin dan inventori/persediaan), materials (bahan baku pendukung, yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi, serta manusia (labor)).⁷³

Sistem ekonomi islam yang bertujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang

⁷¹ *Ibid.*, h. 150.

⁷² Mustofa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 108

⁷³ *Ibid*

dihasilkan dengan tidak menyalahi al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam.⁷⁴

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh nasution, faktor produksi yang utama menurut al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Firman Allah:⁷⁵

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَغْمِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)” (QS. Hud:61.)

Dari ayat di atas dapat diambil suatu analisa bahwa, Allah Swt menciptakan manusia dari tanah, agar supaya manusia menjadi pemakmur di muka bumi dan memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya tanpa dengan merusaknya.

Jelaslah bahwa setiap kegiatan ekonomi manusia merupakan pemegang peranan penting termasuk dalam proses produksi. Manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dari konteks manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di bumi yang memiliki unsur rohani tidak dapat dilepaskan dalam mengkaji proses produksi yang lain menurut cara pandang al-Qur'an dan hadits.⁷⁶

⁷⁴ Muhammad Turmudi, *Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Islamadina, Vol. XVIII, No. 1 (Maret, 2017), h. 39.

⁷⁵ Departemen Ri, *Al-Qur'an dan....*, h. 228.

⁷⁶ *Ibid*

Al-Qur'an dan hadits memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:⁷⁷

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi karena sifat rahman dan rahim-Nya kepada manusia, oleh karena itu sifat tersebut harus melandasi dalam segala aktivitas produksi.
2. Segala bentuk produksi beserta kemajuannya yang didasarkan pada penggunaan metode ilmiah, penelitian, eksperimen tidak boleh lepas dari al-Qur'an dan hadits.
3. Teknik produksi diserahkan sepenuhnya kepada manusia dan disesuaikan dengan kemampuannya. Seperti sabda Nabi Saw: "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian,"
4. Dalam berinovasi pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghilangkan kesulitan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat.

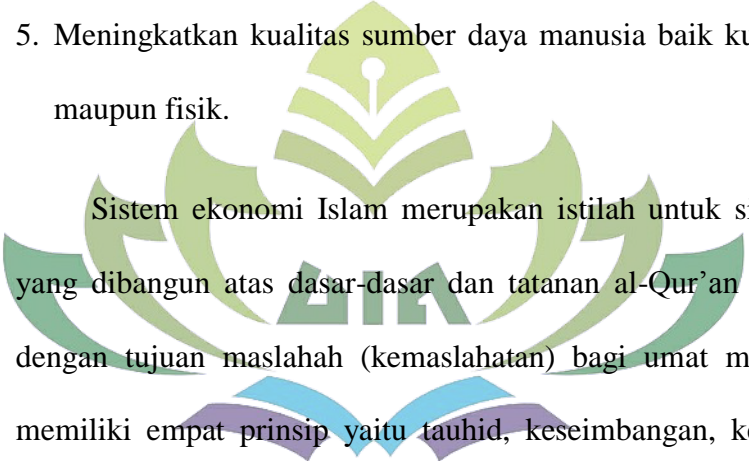
Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:⁷⁸

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal dan berasal dari bahan baku yang halal pada setiap produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk memelihara keserasian, membatasi polusi, dan ketersediaan sumber daya alam.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat, untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun fisik.



Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tujuan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia dengan memiliki empat prinsip yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syariah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajiiyyat dan tahsiniyat, kegiatan produksi harus

memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan.⁷⁹

b. Penyimpanan produk atau bahan baku halal

Bahan atau produk halal yang disimpan pada tempat penyimpanan atau rak penyimpanan tidak boleh tercampur dengan bahan atau produk haram, harus dipisahkan, apalagi penyimpanannya pada ruangan dingin, jika penyimpanannya tercampur dalam satu ruangan dingin, ini akan berakibat pada tercampurnya unsur yang akan dibawa oleh suhu dingin.⁸⁰

c. Distribusi produk yang sesuai syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.⁸¹ Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.⁸²

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan

⁷⁹ Muhammad Turmudi, *Produksi Dalam Prespektif....*, h. 54.

⁸⁰ Marco Tieman dkk, *Principle in Halal Supplay....*, h. 232

⁸¹ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Abditama, 2001), h. 125

⁸² M. Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129.

permasalahan utama dalam ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.⁸³

Islam memandang bahwa “pemisahan materi merupakan segalanya bagi kehidupan” adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non-material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁸⁴

d. Pemasaran yang sesuai syariah

Pemasaran dalam al-Qur'an meliputi tiga unsur, yaitu: pertama adalah pemasaran beretika, pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan

⁸³ Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003), h. 81.

⁸⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. Al-Quran memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan dalam kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas.⁸⁵

Kedua adalah pemasaran profesional, pemasaran yang profesional dalam al-quran harus memenuhi beberapa unsur diantaranya: bersikap adil dalam berpromosi. Perilaku curang, adanya unsur gharar atau kebohongan, manipulasi, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebathilan, baik dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan memberitahukan harga atau banyaknya pemesanan sering kali merusak citra bisnis diberbagai wilayah. Realitas ini bertolak belakang dengan etika pemasaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran.⁸⁶ Berikutnya adalah bersikap adil terhadap orang lain walaupun mereka adalah orang non-muslim, sehingga konsep rahmatan lil ‘alamin benar-benar terimplementasi bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Keadilan merupakan tujuan utama dari syariat islam. Keadilan harus

⁸⁵ Moh. Toriquddin, *Etika Pemasaran Prespektif al-Quran dan Relavansinya dalam Perbankan Syariah*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2015), h. 117-118

⁸⁶ Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), h. 107

diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti dalam masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.⁸⁷

Ketiga adalah transparan dalam pemasaran. Dalam teori pemasaran perspektif al-Quran, pemasaran dikatakan transparan jika tidak menggunakan cara batil, realistis, dan bertanggung jawab. Suatu bisnis dilarang oleh syariat islam jika di dalamnya mengandung unsur tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki. Maka semua ajaran yang ada di dalam al-Quran berupaya menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk menerapkan hukum Allah dalam dunia bisnis.⁸⁸

3. Indikator Produk Halal

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁸⁷ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 5

⁸⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 125

1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.⁸⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal. Diantaranya adalah proses sertifikasi yang relatif cepat yaitu hanya butuh waktu maksimal 50 hari dan biaya yang terjangkau hanya sekitar Rp 2-5 juta per kelompok produk. Sertifikasi halal penting agar masyarakat tidak perlu ragu mengonsumsi produk yang bersangkutan. Direktur Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim mengatakan, ada beberapa kriteria yang diberikan MUI untuk menyatakan suatu produk tersebut halal atau tidak. Misalnya bahan bakunya harus halal. Secara global ada tiga, bahan bakunya harus halal, fasilitasnya tidak terkontaminasi, sistemnya yang dapat menjamin konsistensi produk halal. Secara spesifik, ada 11 kriteria suatu produk dinyatakan halal. Salah satunya yaitu produk tersebut memiliki sistem keterelusuran. Artinya, bahan dasar produk yang dihasilkan bisa ditelusuri kehalalannya.⁹⁰

Adapun 11 kriteria produk halal yang dilabeli oleh MUI adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Perusahaan memiliki kebijakan halal

⁸⁹ My Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 01 Maret 2017, h. 99.

⁹⁰ Nicha Muslimawati, Kumparan.com, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019

⁹¹ *Ibid*

- b. Tim manajemen pengelola kebijakan halal
- c. Melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai konsep halal
- d. Memiliki kriteria tentang bahan halal dan non halal
- e. Mengetahui kriteria produk yang bisa dan tidak bisa disertifikasi
- f. Memiliki fasilitas yang bebas dari hal yang mencemari kehalalan
- g. Memiliki kriteria prosedur tertulis untuk aktivitas produksi dalam keadaan kritis
- h. Memiliki sistem ketelusuran dalam artian bahan dasar produk yang digunakan bisa ditelusuri kehalalannya
- i. Prosedur menangani produk yang tidak halal
- j. Memiliki tim audit internal untuk melakukan evaluasi minimal enam bulan sekali
- k. Memiliki tinjauan manajemen atau manajemen review

D. Teori Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹² Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan

⁹² Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Ghaila, 2011), h. 49.

jasmani dan kebutuhan rohani. Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.⁹³

Menurut Yusuf Qardhawi konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera.⁹⁴ Konsumsi menurut Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani adalah apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini diartikan bahwa seorang muslim berkonsumsi dalam kondisi yang cukup, bukan kondisi meminta-minta.⁹⁵

Pola konsumsi secara sederhana didefinisikan sebagai bagaimana seseorang hidup (*how one lives*), termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, bagaimana ia mengalokasikan waktunya dan sebagainya.⁹⁶ Pola konsumsi menunjukkan bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. Pola konsumsi dapat berubah, akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Kebutuhan

⁹³ Arif Pujiyono, "Teori Konsumsi", Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 3, No. 2, (Desember 2006), h. 196.

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Konsumsi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Gema Insani Press, 1997), h. 137.

⁹⁵ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 260-261.

⁹⁶ Yuliana, "Analisis Pola Konsumsi Keluarga Miskin di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, (2014), h. 44.

pada umumnya tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk dimasa kecil. Perubahan ini bisa terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen yang berubah akibat pengaruh lingkungan.⁹⁷

Secara umum istilah konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.⁹⁸

Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁹⁹ Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian serta kosmetik. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan.¹⁰⁰

Menurut Keynes, tingkat konsumsi ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Ini berarti belanja konsumsi itu merupakan bagian dari pendapatan.¹⁰¹

Dilihat dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil suatu analisa bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau

⁹⁷ Atina Shofawati, "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Universitas Airlangga", *Jurnal JSTT*, Vol. 2, No. 3, (Juli 2015), h. 5770.

⁹⁸ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.163

⁹⁹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* Cetakan ke-5 (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 15

¹⁰⁰ Mankiw, N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.

11

¹⁰¹ Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, Edisi 17 (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2004), h. 124

rumah tangga dalam memanfaatkan, menggunakan, dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi menjaga keberlangsungan hidup. Sedangkan pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menggunakan uang dan waktunya untuk melakukan kegiatan konsumsi.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah.¹⁰² Sedangkan konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.¹⁰³ Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat diartikan bahwa konsumsi Islam adalah suatu kegiatan ekonomi dalam penggunaan barang dan jasa untuk digunakan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah.

2. Konsumsi dalam Islam

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Harta bukan segala-galanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Konsep Islam menekankan

¹⁰² Pusat Pengkajian Dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 19

¹⁰³ Suherman Rosidi, *Pengantar Teori Ekonomi....*, h. 162

bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, kerja adalah setiap tenaga jasmani maupun kemampuan akal yang dikeluarkan manusia dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan syariah, bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan.¹⁰⁴

Sementara Baqir Quraishi mendefinisikan setiap kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, dan merasakan penderitaan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan mendapatkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁵

Dengan konsep harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembuangan uang yang menghasilkan tambahan pemilikan uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian.

Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seseorang muslim yang membedakannya dengan konsumsi non muslim (konvensional). Prinsip tersebut disarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits nabi SAW dan perilaku sahabat r.hum. prinsip-prinsip tersebut antara lain.

- a. Prinsip Syariah
- b. Memperhatikan tujuan konsumsi

¹⁰⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), h. 9

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 92

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah SWT dalam surat Al-An’am 162:¹⁰⁶

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Artinya: Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta alam.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, pada hakikatnya segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia dalam kesehariannya adalah semata-mata hanya berfungsi ibadah dalam rangka mendapat ridha Allah Swt.

a. Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172:¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

¹⁰⁶ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan....*, h. 150.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 27.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah Allah berikan. Makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah.¹⁰⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Allah memerintahkan kepada semua umatnya yang mukmin untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik agar doa dan ibadah yang dipanjatkan tidak ada hambatan dan dapat terkabul.

Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadits kebersihan merupakan bagian dari iman. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam mengonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi (dilarang). Pada prinsipnya ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan fisik maupun spiritualitas manusia. Sehingga ketentuan ini harus dipatuhi oleh seorang muslim.

¹⁰⁸ Tafsir Ibnu Katsir ..., h. 35.

b. Memperhatikan bentuk konsumsi

Dari aspek ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (*maximum utility*), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apa pun yang dikonsumsi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan muslim dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim dilarang misalnya mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras (khamr), candu/narkotik, dan berjudi.¹⁰⁹

c. Prinsip Kualitas

1) Sederhana, tidak bermewah-mewahan

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih. Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan (*ishraf*), karena sikap ini sangat dibenci Allah SWT. Demikian juga sifat mubazir, sifat mubazir merupakan sifat yang dibenci Allah SWT.

Dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (*tarf*). Sikap *tarf* merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan

¹⁰⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi...*, h. 91

indikator terhadap kerusakan dan goncangnya tatanan hidup masyarakat. Karena hal tersebut telah merebak, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kehancuran dan kebinasaan.

2) Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Pemasukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor lain.¹¹⁰

3) Prinsip Prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam, antara lain¹¹¹:

- a) Nafkah diri.
- b) Nafkah istri.
- c) Nafkah kerabat.
- d) Nafkah bagi pihak yang membantu istri.
- e) Nafkah untuk budak.
- f) Nafkah memperjuangkan agama Allah.

4) Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memerhatikan nilai prinsip moralitas, prinsip ini bukan hanya

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 97

¹¹¹ *Ibid.*, h. 98

mengenai makan dan minum. Tujuan akhir makan dan minum adalah untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual.¹¹² Dimana prinsip ini mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam rangka menjaga martabat manusia yang mulia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ketika makan memakai tangan kanan, membaca doa, dan tidak mencela makanan dan sebagainya.¹¹³

3. Batasan Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Secara hirarkisnya, kebutuhan manusia meliputi: keperluan, kesenangan, kemewahan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah dan sederhana. Bukan hanya aspek halal-haram saja yang menjadi batasan konsumsi dalam syari'at Islam. Di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta yaitu:¹¹⁴

a. Batasan dalam segi kualitas

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan narkoba.

167. ¹¹² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.

¹¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, h. 99 .

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*, h. 158.

b. Batasan dalam segi kuantitas

Manusia tidak boleh terjerumus dalam kondisi “besar pasak dari pada tiang”, yaitu pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran, apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak.

Batasan konsumsi dalam syari’at tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja. Tetapi mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki keterkaitan langsung yang dapat membahayakan terhadap fisik, moral maupun spiritual, serta keharaman yang disebabkan karena menggunakan cara yang bathil untuk mendapatkannya yang dapat membahayakan dirinya dan merugikan orang lain.

E. Teori Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Diskonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan.¹¹⁵

¹¹⁵ Nita Melia Sari, “Analisis Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada masyarakat Petani Kopi di Desa Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan minimum yang diperlukan.¹¹⁶

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.¹¹⁷ Pemanfaatan (konsumsi) merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan, dengan kata lain pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun negara.¹¹⁸

Perilaku adalah tingkah laku, kelakuan, perbuatan, kejadian, peristiwa, sesuatu hal yang terjadi. Rangsangan tersebut bisa datang dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.¹¹⁹

Way Kanan". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, Lampung, 2014), h. 41.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 42.

¹¹⁷ Ekawarna & Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: GP Press, 2010), h. 153.

¹¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: PT Bakti Wakaf, 1995), h. 17.

¹¹⁹ Philip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid I edisi 12* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 159.

Dalam teori konvensional, perilaku konsumsi diartikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.¹²⁰

The American marketing Association mendefinisikan bahwasannya perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.¹²¹ Dari definisi di atas ada tiga hal utama yang dapat ditelaah, yaitu:

- a. Perilaku konsumen adalah dinamis, dalam pengertian bahwa dalam perilaku seorang konsumen, grup konsumen, atau masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya perilaku konsumen dapat berubah-ubah dan biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk tertentu, dan individu atau grup tertentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hidupnya;
- b. Hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar oleh karena itu dalam hal pengembangan strategi pemasaran, interaksi yang terjadi tersebut belum tentu akan memberikan hasil yang sama disepanjang waktu, pasar, dan industri;

¹²⁰ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasinya Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 3.

¹²¹ Nugroho J. Setiadi, *Edisi Revisi Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 3.

- c. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah peran pemasaran dimana pasar merupakan tempat untuk menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan penerapan strategi pemasaran.

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Tingkat Konsumsi

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga besar diantaranya: faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor demografi (kependudukan), faktor-faktor non ekonomi.¹²²

a. Faktor-faktor Ekonomi

Empat faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi adalah:

1) Pendapatan rumah tangga (*household income*)

Pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

Dimana pendapatan terdiri dari upah atau permintaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.¹²³

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya, semakin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli

¹²² *Ibid.*, h. 264

¹²³ Paul A. Samuel & William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro....*, h. 258

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Bogor: Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- A. Karim, Muchith, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan: Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- A. Mas'adi, Ghufuran, *Ensikopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, Cet ke-4, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013..
- Ekawarna dan Muslim, Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: GP Press, 2010.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia* Cetakan ke-5, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fuad, Muhammad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- James, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Ghaila, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.
- Hermawan Kertajaya, dan Sula Muhammad Syakir, *Syari'ah Marketing* (Bandung: Penerbit Mizan, 2006.
- Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, Philip & Gary Armstrong, Gary, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid I edisi 12*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2003.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Pabundi Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Cet. Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.
- Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Semarang: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Mustofa Edwin dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- N. Gregory, Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Q. Badu, Syamsu dan Novianty Djafri, Novianty, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Konsumsi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT Bakti Wakaf, 1995.

- Rahardja, Pratama & Manurung, Mandala, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Rianto, Muhammad Nur, Al-Arif dan Amalia, Euis, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rivai, Veitzal dan Arifin, Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Santoso, Bambang, dkk, *Capacity Building*, Malang: UB Press, 2012.
- Setiadi, Nugroho J, *Edisi Revisi Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasinya Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Siringoringo, Hotniar, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2012.
- Soemitro Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2009.
- S. Rao, Singiresu, *Engineering Optimization: Theory and Practice*, New Jersey: Jhon Wileyand Sons, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sya'rawi, Mutawalli, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.
- T. Keban, Yeremias, *Good Governance dan capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah*, Yogyakarta: Gava Media, 2000.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Paul A, Samuelson, dan Nordhaus, William D, *Ilmu Mikroekonomi*, Edisi 17, Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2004.

Wibowo, Edy, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia Cet I, 2005.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

B. Journal

Apriyanti, Hani Werdi, *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis peluang dan Tantangan*, dalam Jurnal Maksimum, Vol. 1, No. 1, September 2017.

Charity, My Lim, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14, No. 01 Maret 2017.

Faizal Irany Sidharta, Raden Bagus, *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal*, dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol. 5. No. 2, September 2017.

Nasrullah, Aan, *Analisis Potensi Industri Halal bagi Pelaku Usaha di Indonesia*, Ejournal Kopertais4.or.id.

Novitasari, Maya, *Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals*” dalam Jurnal Majalah Ekonomi, Vol. XXIV, No. Juli 2019.

Pujiyono, Arif, *“Teori Konsumsi”*, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 3, No. 2, Desember 2006.

Shofawati, Atina, *“Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Universitas Airlangga”*, Jurnal JSTT, Vol. 2, No. 3, Juli 2015.

Sungkawaningrum, Fatmawati, *Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal*, dalam Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2 Oktober 2019.

Supriyatni, Renny, *Eksistensi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 2, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Juli 2011.

Toriquddin, Muhammad, *Etika Pemasaran Prespektif al-Quran dan Relevansinya dalam Perbankan Syariah*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.

Turmudi, Muhammad, *Produksi Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Islamadina, Vol. XVIII, No. 1, Maret, 2017.

Waharini, Faqiatul Mariya dan Purwantini, Annisa Hakim, *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*, dalam Jurnal Muqtasid, Vol. 9. No. 1, Juni 2018.

Yuliana, “Analisis Pola Konsumsi Keluarga Miskin di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2014.

C. Publikasi Ilmiah

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: 2011.

Indonesia Tanah Airku, *33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu* (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2007).

Muflihah, M. Dliyaul, *Konstruktor Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*, dalam Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *fesyen Muslim Indonesia*, dalam Ditjen PEN/WRT/31/IV/2015.

Sari, Nita Melia, “*Analisis Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada masyarakat Petani Kopi di Desa Gedung Rejo Kec. Baradatu Kab. Way Kanan*”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, Lampung, 2014.

Pusat Pengkajian Dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

D. Ensiklopedia dan Kamus

Azka Nadhira, Raden Roro *Potensi Industri Halal Di Indonesia*, www.ibec-febui.com

Dessy Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.

E. Word Wide Web

Bi.go.id.

<https://www.cnbcindonesia.com>.

Fesyarinindonesia.com.

Lampung.bps.go.id.

Lampungprov.go.id.

M.liputan6.com.

Muslimawati, Nicha, Kumparan.com.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Januari 2019”, Dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019.aspx>5.

Primadhyta, Sayr, “*Industri Halal Jadi Pelumas Perluasan Pasar Bank Syariah*”, CNN Indonesia, dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171109114632-78-254536/industri-halal-jadi-pelumas-perluasan-pasar-bank-syariah>.

Yulia, Lady, halal Lifestyle makin Mendunia, <http://bimasIslam.kemenag.go.id/post/opini/halal-lifestyle-makin-mendunia>.

F. Wawancara

Ais, Wawancara dengan Karyawan Toko Busana Muslim Nibra’s House Cabang Bandar Lampung, 15 September 2019.

Dewi, Wawancara dengan Kasir Elzatta, Bandar Lampung, 15 September 2019.

Eni, Wawancara dengan Kasir Toko Busana Muslim Umma Jilbab, Pringsewu 25 September 2019.

Hendra, Wawancara dengan Pemilik Toko Hendra Jilbab, Pringsewu 22 September 2019.

Heryanto, Wawancara dengan Pemilik Toko Busana Muslim Fina AA, Metro 19 September 2019.

Joko, Wawancara dengan Pemilik Toko Hijrah Fashion, Metro 19 September 2019.

Lilis, Wawancara dengan Pemilik Toko Robbani, Metro 19 September 2019.

Mirwan, Wawancara dengan Pemilik Toko Anak Sholeh Muslim Kids, Metro 19 September 2019.

Riko, Wawancara dengan Pemilik Toko Busana Muslim Aisyah Hijab, Metro 19 September 2019.

Triya, Wawancara dengan Owner Zoya Cabang Pahoman, Bandar Lampung, 15 september 2019.

Yenita, Wawancara dengan Kasir Toko Duta Square, Bandar Lampung 15
September 2019.

